



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

Jalan Jend.Sudirman No.18 Telp.0532 ☎ 21195 📠 21504
PANGKALAN BUN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

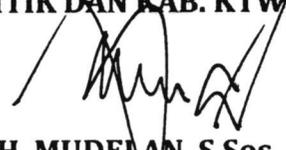
Berpedoman pada peraturan diatas maka untuk mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah kebijakan program dan kegiatan.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan tersusun serta terpadu sesuai yang diharapkan guna mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya laporan ini sangat kami harapkan.

Pangkalan Bun, Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAN KAB. KTW. BARAT**



**H. MUVELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur teknis di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat pula, telah mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Adapun penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2018 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 33 (Tiga Puluh tiga) Kegiatan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran penunjang program dan kegiatan..

Adapun indikator kinerja utama (IKU) dari 4 (empat) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut.

1. Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina.
2. Jumlah konflik sosial.
3. Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif.
4. Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina.
5. Indeks pemahaman politik masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan capaian dari 5 (lima) indikator kinerja diatas diperoleh rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 91,06 % (sangat Tinggi). Secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah menganggarkan pembiayaan untuk total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 5.831.939.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.538.973.337,- atau 94,98% (sangat tinggi). Dari jumlah anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran penunjang sebesar Rp. 2.339.721.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.159.655.225,- atau 92,30% (sangat tinggi).

Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dan akan dihadapi dimasa akan datang telah dirumuskan strategi pemecahannya melalui aspek strategik organisasi, meliputi analisis terhadap sasaran strategis pembangunan yang merupakan langkah awal dalam pemecahan permasalahan untuk mewujudkan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Barat salah satu perangkat daerah dari 38 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki luas wilayah 10.759 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 269.629 jiwa, terbagi dalam 6 (enam) kecamatan serta 81 Desa dan 13 Kelurahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal sebanyak 4 (empat) buah instansi yaitu Kodim 1014 Pangkalan Bun, Polres Kotawaringin Barat, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, dan Sub Denpom Pangkalan Bun.

Perubahan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai perangkat daerah maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018. Sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

➤ Tugas Pokok Badan Kesbangpol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah *melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik*.

➤ Fungsi Badan Kesbangpol .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut .

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana maksud di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut .

- 1) Koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan nilai-nilai sejarah ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa;
- 2) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDM di Bidang Intelijen, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Konflik Sosial, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;

- 3) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Pembauran Akulturasi Budaya, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
- 4) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- 5) Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan perekonomian.

D. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam melaksanakan tugas mempunyai *sasaran pembangunan* yang akan dicapai dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut.

1. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
6. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi ;
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlenegkapan
 - 2.3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang terdiri dari :
 - 3.1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi ;
 - ❖ Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - ❖ Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

- 3.2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi ;
- ❖ Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - ❖ Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
- 3.3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi ;
- ❖ Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - ❖ Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 3.4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Membawahi ;
- ❖ Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - ❖ Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana dalam Tabel 1, 2, 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 1
Keadaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

NO	Golongan I	1 Januari 2018	31 Desember 2018	+	-
I.	Gol. I/a	--	--	--	--
	Gol. I/b	--	--	--	--
	Gol. I/c	--	--	--	--
	Gol. I/d	--	--	--	--
Jumlah Gol. I		--	--	--	--
II.	Gol. II/a	1	1	--	--
	Gol. II/b	--	---	--	--
	Gol. II/c	3	3	--	--
	Gol. II/d	2	2	--	--
Jumlah Gol. II		6	6	--	--
III.	Gol. III/a	3	3	--	--
	Gol. III/b	2	2	--	--
	Gol. III/c	7	7	--	--
	Gol. III/d	4	4	--	--
Jumlah Gol. III		16	16	--	--
IV.	Gol. IV/a	2	2	--	--
	Gol. IV/b	3	3	--	--
	Gol. IV/c	1	1	--	--
	Gol. IV/d	--	--	--	--
	Gol. IV/e	--	--	--	--
Jumlah Gol. IV		6	6	--	--
Jumlah Semua		28	28	--	--

Tabel 2
Pegawai yang menduduki Jabatan Tahun 2018

No	Eselon	Formasi	Terisi	Ket
1	II/b	1	1	--
2	III/a	1	1	--
3	III/b	4	4	--
4	IV/a	8	8	--
		17	14	--

Tabel 3
Tingkat Pendidikan/Ijazah Pegawai Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	--
2	SLTP	2
3	SLTA	5
4	Sarjana Muda (D.II)	1
4	Sarjana Muda (D.III)	2
5	Sarjana (S-1)	17
6	Sarjana (S-2)	1
		28

Tabel 4
Tingkat Diklat Penjenjangan Pegawai Tahun 2018

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	ADUM / DIKLATPIM TINGKAT IV	4
2	SPAMA / DIKLATPIM TINGKAT III	5
3	SPAMEN / DIKLATPIM TINGKAT II	1
		10

F. Sistematika Penyajian

Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut .

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Data Umum Organisasi
- I.2. Aspek Strategis Organisasi
- I.3. Struktur Organisasi
- I.4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- II.1. Rencana Strategis
- II.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Capaian Kinerja Organisasi
- III.2. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. Rencana Strategis

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2017 – 2022 yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan APBD.

Perencanaan strategis (Renstra) juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai lima tahunan yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan berdasarkan tolak ukur kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat yang terpilih serta memperhatikan tantangan dan peluang serta serta isu-isu strategis yang telah ditentukan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun kedepan yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis.

A. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah .

“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan

Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”

B. Misi

Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang keempat dan kelima yaitu .

- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat
- Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram dan Dinamis

C. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional Menjaga kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Sasaran

1. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
6. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional.

Tabel Tujuan dan Sasaran

SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	85%	90%	95%	100%

Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Jumlah konflik sosial	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yg kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.	Jumlah konflik sosial	10 kasus				
	Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	85%	90%	95%	100%
	Indeks pemahaman politik masyarakat	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%	
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	80%	85%	90%	95%	100%
				Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	80%	85%	90%	95%	100%
				Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	80%	85%	90%	95%	100%

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu

ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut.

1. Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina.
2. Jumlah konflik sosial.
3. Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif.
4. Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina.
5. Indeks pemahaman politik masyarakat.

Adapun untuk rumusan dan penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2018**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	- Jumlah konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi (tahun n) dibagi target konflik sosial (tahun n) dikali 100%	Kabid.Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional (KPA)	Laporan hasil pemantauan/ monitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Jumlah masyarakat yang telah dibina dibagi jumlah target masyarakat yang dibina dikali 100%	Kabid. Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa (KPA)	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang

Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah total keseluruhan Ormas/LSM yang di Kab.Ktw.Barat dikali 100%	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas (KPA)	Data Base Ormas/LSM
		Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	Jumlah Ormas/LSM yang dibina dibagi jumlah Ormas/LSM yang terdaftar yang di Kab.Ktw.Barat dikali 100%	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas (KPA)	Laporan Pembinaan Ormas/LSM di Kab.Ktw.Barat
	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang telah dibina melalui pendidikan politik dibagi jumlah target masyarakat yang dibina dikali 100%	Kabid.Politik Dalam Negeri (KPA)	Data Laporan Bidang Poldagri

F. Strategi

Strategi adalah rumusan/cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan SKPD.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

2. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam tabel berikut .

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan	Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara
			Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yg kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.	Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul	Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan		Penguatan kelembagaan kemasyarakatan
	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik		Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol
	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol	

Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: 900/07/II/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa surat menyurat	600.000
		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	141.058.370
		- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000
		- Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.148.800
		- Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.590.800
		- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.480.000
		- Penyediaan alat tulis kantor	52.914.500
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.496.500
		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000
		- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.375.000
		- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.250.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.450.000
		- Pengadaan peralatan gedung kantor	4.000.000
		- Pengadaan mebeleur	10.000.000
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.250.000
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.770.000
		- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	47.250.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan mesin/kartu absensi	6.000.000
		- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.850.000
		- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	19.250.000
5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	103.300.000
6.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500.000
		- Penyusunan laporan keuangan semesteran	550.000
		- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.826.630
7.	Pemeliharaan Kantrantibmas	- Peningkatan kerjasama dengan aparat	440.700.000

	Dan Pencegahan Tindak Kriminal	keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	
		- Pencegahan dan penanganan konflik sosial	113.375.400
8.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	120.875.000
		- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	212.215.000
9.	Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	- Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	101.190.000
10.	Pendidikan Politik Masyarakat	- Penyuluhan kepada masyarakat	196.875.000
		- Forum-forum diskusi politik	29.355.000
11.	Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan	- Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	62.025.000
		- Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	72.950.000
TOTAL			2.339.721.000

II. Perjanjian Kinerja (PK)

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian

kinerja merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan/perjanjian/kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Kepala Badan Ksatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan didukung sumber daya dan dana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perjanjian kinerja juga disusun untuk eselon III terhadap eselon II dan eselon IV terhadap eselon III yang merupakan penjabaran dari perjanjian kinerja eselon II terhadap Bupati. Dalam Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan.

Adapun komponen Perjanjian kinerja (PK) adalah sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran PK dibawah ini.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUDELAN, S.Sos
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

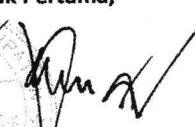
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, November 2018

Pihak Kedua,


Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H

Pihak Pertama,


H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013

PERJANJIAN KINERJA 2018 APBD PERUBAHAN

Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK KAB. KTW. BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah surat yang tersampaikan	12 paket	90%
		Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	90%
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 Unit	90%
		Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	90%
		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	90%
		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	21 unit/thn	90%
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	48 jenis	90%
		Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	12 jenis	90%
		Jumlah penggandaan yang disediakan	106320 lembar	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	90%
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 unit/bh	90%
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	248 org/kali	90%
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	90%
		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit	90%
		Jumlah mebeleur yang diadakan	2 buah	90%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	11 unit/thn	90%
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit/thn	90%
		Jumlah bangunan yang direhab	3 Unit/buah	90%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Pengadaan mesin/kartu absensi	1 unit	90%
		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35 stell	90%
		Jumlah tanda pengenal yang diadakan	32 buah	90%
		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	35 stell	90%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	43 orang	90%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD			
	Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	90%
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 laporan	90%
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun disusun	1 laporan	90%
VI	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Jumlah instansi yang bermitra operasional dibidang pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.	4 instansi	100%
		Jumlah peserta pelatihan deteksi dini	30 orang	

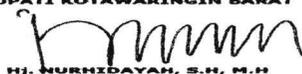
		Jumlah laporan rencana aksi daerah (RAD) yang disusun	30 laporan	100%
VII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi tokoh lintas etnis	100 Orang	0 kasus
		Jumlah Rapat-rapat Gugus Tugas Revolusi Mental (GTRM)	27 orang	
		Jumlah partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda	70 orang	0 kasus
		Jumlah peserta Seminar peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	400 orang	
VIII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta Sosialisasi kerukunan umat beragama	100 orang	85%
IX	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Jumlah peserta Sosialisasi Pendidikan Politik kpd Masyarakat	450 orang	90%
		Jumlah peserta Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017	160 orang	
		Jumlah peserta Sosialisasi Bantuan Parpol dan Pelatihan penyusunan LPJ Banpol	30 orang	90%
		Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi	6 laporan	
X	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan			
	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan Ormas/LSM	180 orang	90%
		Laporan hasil monitoring ormas/LSM	6 laporan	90%
		Jumlah pelaksanaan Rapat tim saber pungli	4 kali	

Program	Anggaran	Ket.
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.163.970	APBD Perubahan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.720.000	APBD Perubahan
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	50.100.000	APBD Perubahan
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	103.300.000	APBD Perubahan
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.876.630	APBD Perubahan
6. Pemeliharaan Kontributifitas dan Pencegahan Tindak Kriminal	554.075.400	APBD Perubahan
7. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	333.090.000	APBD Perubahan
8. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	101.100.000	APBD Perubahan
9. Pendidikan Politik Masyarakat	226.230.000	APBD Perubahan
10. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	134.975.000	APBD Perubahan
Jumlah	2.339.721.000	

Pangkalan Sun, November 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT


HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.


H. NUDELAN, S.SOS
NIP. 19600215 198203 1 013

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kinerja organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel Skala Pencapaian Kinerja

Urutan	Skala Pengukuran	Kategori
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51 ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

II. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran penunjang. Dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah " **Sangat Tinggi** " dengan prosentase nilai **91,06 %** .

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Ket.
1.	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Jumlah konflik sosial	10 kasus	9 kasus	90	Tinggi
2.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	88,11%	110	Sangat Tinggi
3.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	65,09%	76,58	Tinggi
		Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan	80%	42,86%	53,58	Rendah

		terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina				
4	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	100%	125	Sangat Tinggi

Untuk program dan kegiatan penunjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang merupakan penyelenggara pemerintah daerah pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pengukuran kinerja pada tabel dibawah ini .

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2018	(%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	80%	80%	100
2.	Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	100
		Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	80%	80%	100
		Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	80%	80%	100
		Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	80%	80%	100

Dari tabel di atas dapat dianalisa untuk indikator kinerja pada sasaran penunjang yang mendukung terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik dan berdasarkan target kumulatif pada renstra untuk realisasinya capaian sangat tinggi.

- Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini .

I. Sasaran . Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, target dan realisasi yang tertuang pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1.	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Jumlah konflik sosial	10 kasus	9 kasus	90%

Program yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan sebagai berikut .

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Pencegahan dan penanganan konflik sosial

Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dan kegiatan Pencegahan dan penanganan konflik sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Badan Koordinasi dalam bidang pemeliharaan keamanan daerah dan pencegahan dan penanganan konflik sosial yang melibatkan dan bermitra dengan aparat keamanan daerah dan instansi vertikal (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri P.Bun) dilaksanakan melalui Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan daerah dan instansi vertikal dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan bentuk kegiatan sebagai berikut .

- Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim FKDM dan Tim Pengawasan Orang Asing berdasarkan SK Bupati Kab.Ktw.Barat
- Melaksanakan pemantauan dan monitoring lapangan dengan melibatkan Badan Intelijen Daerah (BIN) pada saat adanya gejala/kejadian yang menonjol didaerah
- Melaksanakan Pengawasan Orang Asing di Perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa Kecamatan di Kab.Ktw.Barat

- Melaksanakan rapat pencegahan dan penanganan konflik sosial yang melibatkan aparat keamanan daerah serta instansi vertikal (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri P.Bun)
- Melaksanakan rapat-rapat tentang pengawasan orang asing dan kewaspadaan dini masyarakat/FKDM
- Melaksanakan pemantauan ke lapangan pada aksi unjuk rasa/demonstrasi massa
- Menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Daerah (RAD) B 04, B 08 dan B 12 ke Provinsi terkait hasil kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial
- Menyusun dan melaporkan hasil monitoring dan pemantauan lapangan terkait unjuk rasa/demonstrasi/kejadian yang menonjol dan bersinergi dengan Aparat Keamanan daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada tabel capaian sasaran stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik dengan indikator kinerja Jumlah konflik sosial dengan target Tahun 2018 adalah 10 kasus dimana unjuk rasa (demonstrasi massa) termasuk kategori konflik sosial dan selama tahun 2018 telah terjadi 9 kasus baik unjuk rasa (demonstrasi massa) ataupun perdebatan/polemik yang dapat menyebabkan munculnya konflik sosial, hasil dari pemantauan/monitoring dan pelaporan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik Sosial pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat dengan capaian indikator kinerja adalah **90%** atau kategori **tinggi**.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)
I.	Jumlah konflik sosial	554.075.400	536.205.200	96,77%
Capaian Kinerja Keuangan				96,77%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran ini adalah 100% : 96,77%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 3,23% dari total pagu anggaran program ini.

Perbandingan target kinerja pada Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
I.	Jumlah konflik sosial	N/A	10 kasus	N/A	9 kasus	N/A	90%

Berdasarkan data tabel perbandingan diatas yang dimulai dari Tahun 2017 karena tahun 2017 merupakan masa transisi atau tahun dimulainya rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 awal dari adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga merubah status OPD yang semula Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini juga mempengaruhi struktur program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol, salah satunya adalah adanya kegiatan baru yaitu kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial dalam mendukung stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif didaerah, sehingga untuk indikator kinerja jumlah konflik sosial masih berupa N/A (not available), akan tetapi kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut telah dilakukan antara lain : Melaksanakan pemantauan dan monitoring lapangan dengan melibatkan Badan Intelijen Daerah (BIN) pada saat adanya gejala/kejadian yang menonjol didaerah, Melaksanakan Pengawasan Orang Asing di Perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa Kecamatan di Kab.Ktw.Barat dan Melaksanakan rapat dengan aparat keamanan daerah/instansi vertikal.

II. Sasaran : Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, target dan realisasi yang tertuang pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2018	(%)
1.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	88,11	110

Program yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
- Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selaku fasilitasi dalam menjaga toleransi dan soliaritas antar suku bangsa yang berpedoman pada 4 (empat) pilar berkebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD Tahun 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Badan Kesbangpol berkoordinasi dan bersinergi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam mewujudkan pengembangan bina ideologi dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- Rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- Penyuluhan/sosialisasi tentang toleransi dan solidaritas antar suku bangsa/lintas etnis
- Melaksanakan rapat tentang gugus tugas revolusi mental
- Seminar peringatan perjuangan pertempuran 14 Januari 1946 Kumai
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB)

➤ Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

- Kegiatan Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Kegiatan Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selaku fasilitasi dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama dan berkoordinasi dan bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan pengembangan bina ideologi dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat , dengan bentuk kegiatan sebagai berikut .

- Rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB)
- Penyuluhan/sosialisasi tentang toleransi dan kerukunan umat beragama

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada tabel capaian sasaran Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina dengan target Tahun 2018 adalah 80% dan realisasinya adalah 88,11% dengan capaian indikator kinerja adalah **110%** atau kategori **sangat tinggi**.

Keberhasilan ini dikarenakan .

Target kinerja yang direncanakan pada awal penyusunan Rencana Startegis (Renstra) tidak terlalu tinggi, hal ini disebabkan kekhawatiran pada sosialisasi/penyuluhan tentang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, partisipatif lebih condong kepada tokoh-tokoh masyarakat, agama dan lintas suku bangsa, akan tetapi para pemuda pemudi juga dilibatkan dan memberikan respon yang baik dalam kegiatan Hari Sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB), sehingga realisasi atas indikator kinerja Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina untuk sasaran strategis Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan melebihi target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan dengan 2 (dua) Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	333.090.000	312.420.800	93,79%
		101.190.000	89.630.000	88,58%
Capaian Kinerja Keuangan				91,19%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran ini adalah 100% : 91,19%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 8,82% dari total pagu anggaran Kedua program ini.

Perbandingan target kinerja pada Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	80%	80%	88,11	100%	110%

Berdasarkan data tabel perbandingan diatas data yang diambil adalah dimulai dari Tahun 2017 dengan sasaran Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina capaian kinerja antara tahun 2017 dan 2018 adalah sangat tinggi.

III. Sasaran . Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, target dan realisasi yang tertuang pada tabel dibawah ini

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2018	(%)
1.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	100%	125%

Program yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyuluhan kepada masyarakat
- Forum-forum diskusi politik

Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat dan kegiatan Forum-forum diskusi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Badan koordinasi dalam bidang Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan kehidupan kenegaraan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem demokrasi, dimana peranan Badan Kesbangpol sebagai salah satu fasilitator untuk mewujudkan itu melalui Pendidikan Politik masyarakat, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut .

- Rapat koordinasi daerah (Rakorda) menjelang pemilihan umum dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah daerah.
- Sosialisasi/Penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula (Pelajar usia 17 tahun)
- Pelatihan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang melibatkan anggota Parpol.
- Monitoring/pemantauan ke seluruh Kecamatan dalam rangka menjelang persiapan Pemilu Tahun 2019
- Menghimpun dan mengkompilasi laporan akhir tahun untuk pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol yang akan diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada tabel capaian sasaran Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik dengan indikator kinerja Indeks pemahaman politik masyarakat dengan target Tahun 2018 adalah 80% dan realisasinya adalah 100% dengan capaian indikator kinerja adalah 125% atau kategori **sangat tinggi**.

Keberhasilan ini dikarenakan :

Target kinerja yang direncanakan pada awal penyusunan Rencana Startegis (Renstra) tidak terlalu tinggi, hal ini disebabkan kekhawatiran pada sosialisasi/penyuluhan tentang pendidikan politik masyarakat akan sikap antipati masyarakat pada politik sehingga realisasi atas indikator kinerja indeks pemahaman politik masyarakat untuk sasaran strategis terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik melebihi target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks pemahaman politik masyarakat	226.230.000	207.225.000	91,60%
Capaian Kinerja Keuangan				91,60%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran ini adalah 100% : 91,60%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 8,40% dari total pagu anggaran program ini.

Perbandingan target kinerja pada Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	80%	80%	100%	100%	125%

Berdasarkan data tabel perbandingan diatas data yang diambil adalah dimulai dari Tahun 2017 dengan sasaran terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik dengan indikator kinerja Indeks pemahaman politik masyarakat capaian kinerja antara tahun 2017 dan 2018 adalah sangat tinggi.

VI. Sasaran , Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, target dan realisasi yang tertuang pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	65,09%	76,58%
		Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	80%	42,86%	53,58%

Program yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
- Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat

Kegiatan Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selaku fasilitator dalam pembinaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang berkualitas guna menumbuhkan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi/penyuluhan tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang melibatkan Ormas/LSM dan masyarakat pada umumnya
- Monitoring/pemantauan keberadaan dan status domisili Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Memfasilitasi pendaftaran pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi masyarakat yang ingin membentuk suatu Organisasi kemasyarakatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada tabel capaian sasaran Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan target Tahun 2018 adalah 85% dan realisasinya adalah 65,09% dengan capaian indikator kinerja adalah **76,58%** atau kategori **tinggi**.

Untuk indikator yang kedua yaitu Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina dengan target Tahun 2018 adalah 80% dan realisasinya adalah 42,86% dengan capaian indikator kinerja adalah **53,58%** atau kategori **rendah**. Keberhasilan ini dikarenakan .

Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dianggap cukup berhasil dengan capaian kinerja 76,58% atau kategori tinggi, disebabkan sampai pada tahun 2018 total jumlah ormas/LSM yang terdaftar adalah 106 dengan status yang aktif 69 sedangkan status yang tidak aktif berjumlah 37, hal ini menggambarkan jumlah ormas/LSM yang statusnya aktif lebih tinggi karena peran Badan Kesbangpol selaku fasilitator dalam pendaftaran pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ataupun memperpanjang status keaktifan suatu Organisasi kemasyarakatan/LSM.

Sedangkan kegagalan ini dikarenakan .

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina dianggap gagal karena capaian kinerja 53,58% atau kategori rendah, hal ini disebabkan pada kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan Ormas/LSM pada tahun 2018 di 3 (tiga) Kecamatan hanya diikuti oleh 3 (tiga) Ormas/LSM sedangkan pada tahun 2018 ada 7 ormas/LSM yang baru mendaftarkan dan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol. Sebagian besar yang mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan Ormas/LSM adalah masyarakat bukan anggota/pengurus ormas/LSM yang ada, disamping itu juga bidang yang Ketahanan ekonomi, sosbud dan Ormas yang membidangi organisasi dan lembaga kemasyarakatan lebih condong melibatkan/mengikutsertakan masyarakat luas daripada organisasi dengan alasan ormas/LSM ini hanya akan muncul ketika adanya bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, permasalahan ini yang akan menjadi tantangan kedepan bagi Badan Kesbangpol dalam pembinaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pencapaian kinerja keuangan sasaran Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	134.975.000	82.395.000	61,04%
2	Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina			
Capaian Kinerja Keuangan				61,04%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran ini adalah 100% : 61,04%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 38,96% dari total pagu anggaran program ini. Efisiensi ini cukup besar dibandingkan capaian kinerja keuangan untuk sasaran yang lain, hal ini disebabkan adanya sub kegiatan yang hanya menempel pada kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yaitu sub kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang merupakan kebijakan pusat yang turun ke daerah dan menjadi sub kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol. Sub kegiatan ini pun tidak menjadi bagian dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama karena dari nomenklatur dan struktur organisasi sub kegiatan saber pungli seharusnya menjadi tugas dan fungsi pada Inspektorat sebagai lembaga pengawasan daerah. Pada sub kegiatan saber pungli juga cukup banyak pagu kegiatan yang realisasi belanjanya rendah, hal ini salah satu faktor rendahnya capaian kinerja keuangan pada sasaran ini.

Perbandingan target kinerja pada Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	85%	62,24%	65,09%	77,81%	76,58%
2.	Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	N/A	80%	N/A	42,86%	N/A	53,58%

Berdasarkan data tabel perbandingan diatas data yang diambil adalah dimulai dari Tahun 2017 dengan sasaran Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yang pertama yaitu Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif antara tahun 2017 dan 2018 adalah sangat tinggi sedangkan untuk indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina untuk tahun 2017 tidak ada data atau not available (N/A) dikarenakan kegiatan pembinaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan baru ada di tahun 2018 pada saat perubahan nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah.

II. Akuntabilitas Anggaran

Berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor. 900/07/II/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 menganggarkan jumlah belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 3.492.218.000,- dan belanja langsung (BL) sebesar Rp. 2.339.721.000,- data anggaran dan realisasi DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2018 adalah tersaji pada tabel rekap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut;

Tabel Rekap : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung & Langsung TA. 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
I.	Belanja Tidak Langsung	3.492.218.000,00	3.379.319.612,00	112.898.388,00	96,77
1.	Belanja pegawai	3.492.218.000,00	3.379.319.612,00	112.898.388,00	96,77
II.	Belanja Langsung	2.339.721.000,00	2.159.655.225,00	180.065.775,00	92,30
2.	Belanja pegawai	368.122.000,00	363.859.000,00	4.263.000,00	98,84
3.	Belanja barang dan jasa	1.862.349.000,00	1.692.794.625,00	169.554.375,00	90,90
4.	Belanja modal	109.250.000,00	103.001.600,00	6.248.400,00	94,28
	Jumlah	5.831.939.000,00,-	5.538.974.837,00	292.964.163,00	94,98

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh total belanja program dan kegiatan sebesar Rp. 5.831.939.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 5.538.973.337,- atau 94.98% (**sangat Tinggi**). Berikut tabel rincian per Kegiatan untuk Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung TA. 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Belanja	5.831.939.000	5.538.973.337	94,98
I	Belanja Tidak Langsung	3.492.218.000	3.379.319.612	96,77
	Gaji, Tunjangan Dll	3.492.218.000	3.379.319.612	96,77
II	Belanja Langsung	2.339.721.000	2.159.655.225	92,30
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.163.970	669.004.483	95,55
	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	141.058.370	127.113.645	90,11
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000	1.666.500	51,28
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.148.800	99.590.546	93,82
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.590.800	44.583.000	99,98
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.480.000	14.480.000	93,54
	Penyediaan alat tulis kantor	52.914.500	52.914.500	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.496.500	36.496.500	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.375.000	35.041.600	99,06
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.250.000	248.518.192	96,98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.720.000	109.060.379	89,60
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.450.000	33.450.000	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.000.000	2.200.000	55,00
	Pengadaan mebeleur	10.000.000	9.800.000	98,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.250.000	15.505.379	69,69
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.770.000	4.770.000	100
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	47.250.000	43.335.000	91,71
3	Program peningkatan disiplin aparatur	50.100.000	45.700.000	100
	Pengadaan mesin/kartu absensi	6.000.000	6.000.000	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.850.000	22.650.000	91,15
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	19.250.000	17.050.000	88,57
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	103.300.000	93.165.233	90,19
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	103.300.000	93.165.233	90,19
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	14.876.630	14.849.130	99,82
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	500.000	487.500	97,50
	Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Semesteran	550.000	537.500	97,73
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	13.826.630	13.824.130	99,98

6	Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal	554.075.400	536.205.200	96,77
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	440.700.000	427.881.800	97,09
	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	113.375.400	108.323.400	95,54
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	333.090.000	312.420.800	93,79
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	120.875.000	113.652.000	94,02
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	212.215.000	198.768.800	93,66
8	Program kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	101.190.000	89.630.000	88,58
	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	101.190.000	89.630.000	88,58
9	Program pendidikan politik masyarakat	226.230.000	207.225.000	91,60
	Penyuluhan kepada masyarakat	196.875.000	185.270.000	94,11
	Forum-forum diskusi politik	29.355.000	21.955.000	74,79
10	Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan	134.975.000	82.395.000	61,04
	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	62.025.000	51.695.000	83,35
	Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	72.950.000	30.700.000	42,08
Jumlah		2.339.721.000	2.159.655.225	92,30%

Dari pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dimana 10 (sepuluh) kegiatan merupakan kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari data realisasi keuangan kegiatan diatas masih adanya permasalahan yang dihadapi sebagai berikut.

1. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut .

Koordinasi forum-forum diskusi politik dengan pagu kegiatan sebesar Rp.29.355.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.21.955.000,- atau dengan persentase sebesar 74,79 %, hal ini disebabkan pada belanja upah kerja untuk honorarium tim verifikasi bantu keuangan Parpol pada awal perencanaan dianggarkan 3 (tiga) kali verifikasi pada pelaksanaannya hanya dilaksanakan 2 (dua) kali verifikasi sehingga untuk honorarium tim verifikasi bantuan keuangan Parpol hanya direalisasikan 2 (kali) pembayaran upah kerja untuk tim verifikasi bantuan keuangan Parpol. Kemudian kegiatan sosialisasi bantuan keuangan

- Parpol/pelatihan penyusunan LPJ Banpol untuk belanja honorarium narasumber dan moderator tidak direalisasikan dikarenakan narasumber dan moderator berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk dalam kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
2. Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut.
 - a. Kegiatan Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.62.025.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.51.695.000,- atau 83,35%, hal ini disebabkan pada belanja sewa gedung untuk pelaksanaan kegiatan tidak direalisasikan dikarenakan kegiatan pembinaan/sosialisasi Ormas/LSM dilaksanakan digedung Kecamatan yang notabene merupakan gedung Pemerintah Daerah. Kemudian untuk belanja honorarium narasumber dan moderator tidak direalisasikan dikarenakan narasumber dan moderator berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk dalam kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 - b. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.72.950.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.30.700.000,- atau 42,08%, hal ini disebabkan pada belanja perjalanan dinas luar kota saber pungli rencana kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta tidak terlaksana/dibatalkan dan Kegiatan koordinasi saber pungli tingkat Provinsi di Palangkaraya yang awal rencana dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Saber pungli, pada pelaksanaannya yang diundang oleh panitia Provinsi hanya unsur Ketua Saber Pungli.

Dari total anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.2.339.721.000 terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.159.655.225 atau 92,30% sehingga masuk dalam kategori capaian **"sangat tinggi"**

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2018 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Dalam implementasi perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh *stakeholder*.

Dari laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan capaian kinerja yang baik, walaupun masih ada kegagalan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja untuk mendukung sasaran strategis yang telah direncanakan. Hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar 91,06% dengan kategori **Sangat Tinggi** sedangkan capaian total kinerja keuangan 94,98% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.538.974.837,- masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan efisiensi sebesar 5,02%.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang, maka Badan Kesbangpol akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkaji ulang dan merevisi indikator kinerja utama yang mendukung tujuan dan sasaran strategis Badan Kesbangpol.
2. Memformulasikan kembali target pada masing-masing indikator kinerja agar dapat mudah dicapai dan direalisasikan.
3. Meningkatkan peran dan fungsi masing-masing bidang teknis dalam mendukung tercapainya indikator kinerja yang lebih terukur.
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi bersama dengan semua unsur yang menjadi mitra kerja Badan Kesbangpol.
5. Mereviu dan merevisi indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesbangpol untuk tahun mendatang.
6. Semua langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada saat Reviu RPJMD dan Renstra yang akan datang.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 ini, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi guna optimalisasi dan peningkatan atas hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas.

Pangkalan Bun, Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT


H. MUDELAN, S.Sos

NIP. 19600215 198203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 02.a/KESBANG.I/ 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor. 300/15/Kesbang.I/2017 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

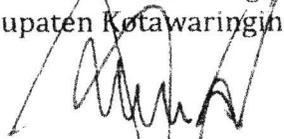
Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 02 Januari 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



H.MUDELAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19600215 198203 1 013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2018

Visi Bupati

"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"

Misi Bupati

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Tugas pokok :

- Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi :

- 1 Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2 Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3 Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis
- 4 Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5 Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6 Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7 Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	- Jumlah konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi (tahun n) dibagi target konflik sosial (tahun n) dikali 100%	Kabid.Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional (KPA)	Laporan hasil pemantauan/m onitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Jumlah masyarakat yang telah dibina dibagi jumlah target masyarakat yang dibina dikali 100%	Kabid. Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa (KPA)	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah total keseluruhan Ormas/LSM yang di Kab.Ktw.Barat dikali 100%	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas (KPA)	Data Base Ormas/LSM
		Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	Jumlah Ormas/LSM yang dibina dibagi jumlah Ormas/LSM yang terdaftar yang di Kab.Ktw.Barat dikali 100%	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas (KPA)	Laporan Pembinaan Ormas/LSM di Kab.Ktw.Barat
	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang telah dibina melalui pendidikan politik dibagi jumlah target masyarakat yang dibina dikali 100%	Kabid.Politik Dalam Negeri (KPA)	Data Laporan Bidang Poldagri

Pangkalan Bun, Februari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S. Sos

NIP. 19600215 198203 1 013

Catatan :

- Unjuk Rasa (Demonstrasi massa) termasuk kategori konflik sosial

PENGUKURAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Jumlah konflik sosial	10	9	90
2	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	88,11%	110
3	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	65,09%	76,58
		Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	80%	42,86%	53,58
4	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	80%	100%	125

Pangkalan Bun, Februari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S. Sos

NIP. 19600215 198203 1 013

Catatan :

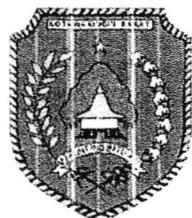
- Unjuk Rasa (Demonstrasi massa) termasuk kategori konflik sosial

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

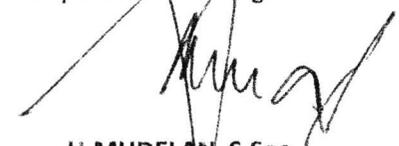


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Pangkalan Bun, Januari 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	Nomor SOP	300/ /Kesbang.l/2018
	Tanggal Pembuatan	Januari 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat  H. MUDELAN, S.Sos NIP. 19600215 198203 1 013
Sub Bagian Penyusunan Program	Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah2. Memahami substansi teknis
Keterkaitan <ul style="list-style-type: none">- Rencana Kinerja Tahunan;- Perjanjian Kinerja;- Laporan realisasi Fisik dan Keuangan;- Laporan Keuangan	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Renstra2. Dokumen RFK3. Dokumen RKT, PK4. Laptop, printer5. Internet
Peringatan <p>LKIP disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir</p>	Pencatatan dan Pendataan <p>File ini disimpan di Sub Bagian Penyusunan Program</p>

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program	Kabid/Kasubid	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menelaah Surat Bupati tentang LKIP	●					Surat Bupati	1 Jam		
2.	Mendisposisi Surat Ke Kasubbag Penyusunan Program		●	●			Disposisi Surat	1 Jam		
3.	Mengumpulkan bahan Penyusunan LKIP				●		Bahan Penyusunan, Renstra, RFK, PK, Data Bidang	7 Hari		
4.	Mengetik Konsep LKIP					●	Bahan Konsep LKIP	7 Hari		
5.	Memeriksa Konsep LKIP dan meneruskan ke Sekretaris			●			Draft LKIP	1 Hari		
6.	Memeriksa Konsep LKIP dan meneruskan ke Kepala Badan		●				Konsep/Hasil periksa draft LKIP	1 Hari		
7.	Memeriksa Konsep LKIP	●					Konsep LKIP	1 hari		
8.	Menindaklanjuti dan mengirimkan ke Bupati, cq. Bagian Organisasi Sekda Kobar dan Inspektorat		●				LKIP Badan Kesbangpol	1 Hari		